



PERKEMBANGAN PELAPORAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

I Gede Dupopadana^{1)*}; Muhammad Khaidir Arief²⁾, Amrie Firmansyah^{3)*}

¹⁾ 4132220028_dupo@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 4132220044_khaidir@pknstan.ac.id Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

* penulis korespondensi

Abstract

The increasing concern due to human activities on the environment has led to demands for accountability and transparency in reporting corporate performance. It has introduced new initiatives to report environmental and social aspects in corporate reporting and financial information. This study aims to review the development of sustainable reporting in Indonesia. The method used in this study is a scoping review using data sourced from related literature from 2018 to 2023. The study results indicate that implementing sustainability reporting in Indonesia has experienced significant development, especially with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 issuance. In addition, integrated reporting is a development of sustainability reporting that shows the relationship between financial, environmental, social, and governance aspects. Although no regulation requires integrated reporting in Indonesia, companies have taken steps to combine financial and non-financial dimensions in their annual reports.

Keywords: *Integrated reporting, Scoping review, Sustainability reporting, Sustainability reporting standards*

Abstrak

Kekhawatiran yang meningkat akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan menyebabkan munculnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan kinerja perusahaan. Hal tersebut memunculkan inisiasi baru untuk melaporkan aspek lingkungan dan sosial dalam pelaporan perusahaan selain informasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas perkembangan pelaporan berkelanjutan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *scoping review* dengan menggunakan data yang bersumber dari literatur terkait selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelaporan keberlanjutan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan terutama dengan diterbitkannya Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017. Selain itu, pelaporan terintegrasi merupakan perkembangan dari laporan keberlanjutan yang menunjukkan keterkaitan antara aspek keuangan, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Walaupun belum ada regulasi yang mengharuskan pelaporan terintegrasi di Indonesia, perusahaan telah mengambil langkah untuk menggabungkan dimensi keuangan dan non-keuangan dalam laporan tahunan mereka.

Kata Kunci: Pelaporan keberlanjutan, Pelaporan terintegrasi, *Scoping review*, Standar pelaporan keberlanjutan

PENDAHULUAN

Dalam beberapa puluh tahun terakhir, perusahaan hanya terus berupaya untuk meningkatkan profitabilitas semata. Selama ini, praktik bisnis yang dijalankan tidak memedulikan aspek lingkungan dan sosial. Kekhawatiran tentang dampak aktivitas manusia terhadap alam, lingkungan sosial, dan ekonomi telah menyebabkan klaim di seluruh dunia terhadap organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap kegiatan operasionalnya. Berbagai standar atau kerangka untuk melaporkan upaya keberlanjutan mulai bermunculan akibat isu lingkungan yang marak maupun adanya kebijakan pemerintah terkait dengan *sustainability development goals*. Seiring dengan meningkatnya minat terhadap investasi berkelanjutan, permintaan atas informasi terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta aktivitas dan kebijakan *environmental, social, governance* (ESG) perusahaan terus meningkat (Christensen et al., 2021).

Menanggapi permintaan akan informasi dan dengan mempertimbangkan kondisi transparansi perusahaan yang ada, banyak entitas memberikan pedoman untuk melaporkan kegiatan ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) secara sukarela. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan dan menstandarkan prosedur pelaporan. Sebagai contoh, SASB (Sustainability Accounting Standards Board) menciptakan "kriteria pengungkapan khusus industri yang mencakup subjek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang signifikan secara



finansial," yang dapat diintegrasikan oleh perusahaan-perusahaan ke dalam laporan mereka. Demikian pula, GRI (*Global Reporting Initiative*) bertujuan untuk membantu organisasi dalam "menyampaikan pengaruhnya terhadap masalah keberlanjutan yang penting" dengan menyusun tolok ukur pelaporan keberlanjutan di seluruh dunia. Peserta terbaru dalam lanskap ini adalah IFRS Foundation, yang mengedepankan strategi universal untuk pelaporan keberlanjutan untuk mengatasi perbedaan berbagai standar dan organisasi yang menetapkan standar-standar tersebut (IFRS 2020). Berbagai standar pelaporan yang telah dikembangkan memunculkan pertanyaan bagi masyarakat atas standar mana yang seharusnya diadopsi oleh perusahaan yang ingin menyampaikan capaiannya dalam melaksanakan proses bisnis yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, penulisan terkait konsep pelaporan keberlanjutan, standar yang dapat digunakan, dan perkembangan pelaporan berkelanjutan yang terintegrasi perlu untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas perkembangan laporan keberlanjutan di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya telah yang telah mengulas laporan berkelanjutan. Penelitian Gokten et al. (2020) menjelaskan perkembangan laporan keberlanjutan mulai dari periode yang belum ada penetapan standar pelaporan berkelanjutan, sampai dengan setelah adanya standar yang ditetapkan. Kluth (2013) meneliti atas pentingnya laporan berkelanjutan yang terintegrasi dan menemukan bahwa dalam mengimplementasikan pelaporan berkelanjutan terintegrasi, dibutuhkan komitmen yang jelas untuk menerapkan strategi, kebijakan, sistem, proses, tujuan, sasaran, indikator kinerja, sistem pengukuran, dan sistem penjaminan. Selain itu, Pistoni et al. (2018) meneliti atas 116 laporan berkelanjutan terintegrasi yang diterbitkan pada tahun 2013-2014, dan menemukan bahwa kualitas dari laporan berkelanjutan terpadu yang diterbitkan masih menitikberatkan pada bentuknya saja, bukan isi dari laporannya. Rupley et al. (2017) juga melakukan penelitian mengenai pelaporan berkelanjutan terintegrasi dan menemukan bahwa pelaporan perusahaan hanya berfokus kepada aspek ekonomi, dan kinerja sosial dengan hanya sedikit berfokus pada aspek tata kelola, serta kurang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh investor. Ulasan penelitian terkait dengan perkembangan pelaporan berkelanjutan di Indonesia masih terbatas, Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada akademisi dan praktisi atas konsep pelaporan keberlanjutan, standar yang dapat digunakan untuk melakukan pelaporan keberlanjutan, dan pentingnya melakukan pelaporan berkelanjutan terintegrasi di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Laporan Keberlanjutan

Pelaporan keberlanjutan, menurut *Global Reporting Initiative* (2016), adalah praktik organisasi dalam melaporkan kepada publik mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, dan kontribusinya baik itu positif maupun negatif, terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Konsep pelaporan berkelanjutan dapat dijelaskan sebagai tindakan mengukur, mengungkapkan, dan memikul tanggung jawab, baik di dalam organisasi maupun kepada pihak eksternal, atas kinerja organisasi dalam mengejar tujuan pembangunan berkelanjutan (*Global Reporting Initiative*, 2016).

Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi dan melibatkan para pemangku kepentingan, pelaporan keberlanjutan juga dapat digunakan untuk meningkatkan pendekatan manajemen dalam mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan (Ceulemans et al., 2015). Idealnya, hal ini memerlukan penggabungan informasi dari laporan keberlanjutan ke dalam sistem manajemen berkelanjutan yang mencakup strategi pembangunan yang terdefinisi dengan baik, rencana kebijakan, inisiatif pembangunan berkelanjutan yang spesifik, dan tindakan yang nyata (Ceulemans et al., 2015). Selain itu, pemantauan kinerja pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan perencanaan organisasi (Ceulemans et al., 2015).



Standar Laporan Keberlanjutan

Standar laporan keberlanjutan yang telah diterbitkan dan digunakan secara global adalah standar yang dikembangkan oleh perusahaan yang didirikan pada tahun 1997 yaitu Global Reporting Initiative (GRI). Standar yang dikembangkan oleh GRI diberi nama The GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI). Sebanyak 73% dari 250 perusahaan besar dunia menggunakan Standar GRI sampai dengan tahun 2020 (Sustain.Life, 2023). Standar GRI dapat membantu meningkatkan transparansi dan mengomunikasikan kontribusi dan dampak keberlanjutan mereka (Global Reporting Initiative, 2022). Dengan pemahaman, pengelolaan, dan pengungkapan dampak yang lebih baik, organisasi dapat membuka manfaat yang menginformasikan keputusan, mengurangi risiko, meningkatkan peluang bisnis, dan memperkuat hubungan pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan kontribusi mereka terhadap pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat keunggulan yang ditawarkan oleh Standar GRI bagi seluruh organisasi yang ingin menggunakannya. Pertama, menyediakan berbagai topik yang komprehensif. Standar mencakup pengungkapan tentang berbagai topik. Dari anti-korupsi hingga air, keanekaragaman hayati hingga pekerjaan, pajak hingga kerja paksa, mereka membahas topik yang relevan di seluruh dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Organisasi memilih di antara ini untuk melaporkan dampak signifikan mereka. Kedua, merupakan sebuah sistem modular yang terdiri dari tiga rangkaian standar: Standar Universal, Standar Sektor, dan Standar Topik. Ketiga, dapat digunakan oleh organisasi mana pun. Standar GRI memungkinkan pelaporan yang konsisten, yang membantu organisasi memenuhi kebutuhan data pemangku kepentingan mereka. Keempat, memiliki struktur yang fleksibel sehingga membantu organisasi menyiapkan laporan keberlanjutan lengkap yang mencakup semua topik yang memiliki dampak signifikan. Organisasi yang menggunakan Standar GRI dapat memilih dan melaporkan topik individu untuk memenuhi permintaan pemangku kepentingan tertentu atau mematuhi persyaratan peraturan. Kelima, telah melakukan pengembangan standar atas sektor karena organisasi di suatu sektor memiliki dampak yang sama terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia. Pelaporan yang lebih konsisten tentang dampak spesifik sektor meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk isu-isu yang paling penting. Keenam, kompatibel dengan kerangka pelaporan lainnya seperti International Integrated Reporting Framework, CDP climate change and water questionnaires, dan SASB industry standards. Ketujuh, selaras dengan praktik terbaik untuk pelaporan dampak proses bisnis. Standar GRI diselaraskan dengan instrumen internasional untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Kedelapan, selalu ditinjau secara berkala untuk memasukkan isu-isu baru yang muncul dan memperbarui topik yang ada. Ini membantu organisasi menanggapi permintaan pemangku kepentingan dan regulator yang muncul untuk informasi keberlanjutan. Selanjutnya, Standar GRI dapat diunduh dan digunakan secara gratis.

Standar Sustainability Accounting Standards Board (SASB) merupakan standar lain yang dapat digunakan oleh organisasi yang ingin menyusun laporan keberlanjutan. Standar SASB memungkinkan organisasi untuk memberikan pengungkapan berbasis industri tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang secara wajar diharapkan dapat memengaruhi arus kas entitas, akses ke keuangan, atau biaya modal dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Standar SASB mengidentifikasi isu terkait keberlanjutan yang paling relevan dengan pengambilan keputusan investor di 77 industri (Sustainability Accounting Standards Board, 2022). Standar dikembangkan menggunakan proses penetapan standar yang ketat dan transparan yang meliputi penelitian berbasis bukti, partisipasi yang luas dan berimbang dari perusahaan, investor dan para ahli, dan pengawasan dan persetujuan dari Dewan Standar SASB yang independen. Investor global mengakui Standar SASB sebagai persyaratan penting bagi



perusahaan yang ingin membuat pengungkapan keberlanjutan yang konsisten dan dapat dibandingkan. Perbedaan Standar SASB dengan Standar GRI terletak pada penggunaan Standar SASB yang lebih fokus terhadap sektor industri, sedangkan Standar GRI dapat digunakan sebagai kerangka pengungkapan keberlanjutan oleh seluruh organisasi.

Negara Indonesia merupakan negara yang telah mewajibkan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Hal ini dimulai dengan penerbitan peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017. Dalam Pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya (Peraturan OJK, 2017). Sebelum menerapkan keuangan berkelanjutan, perusahaan perlu menyusun Rencana Aksi Keuangan Keberlanjutan dan disampaikan setiap tahun kepada OJK. Kemudian, perusahaan dapat menyusun laporan keberlanjutan berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017.

Laporan Terintegrasi

Pelaporan terintegrasi (*Integrated Reporting*) melibatkan prosedur penyampaian informasi tentang pembentukan nilai yang berkelanjutan. Laporan ini menghasilkan pemahaman mengenai sumber daya dan hubungan yang digunakan atau dipengaruhi oleh organisasi, di samping interaksi antara organisasi dan lingkungan eksternalnya (International Integrated Reporting Committee, 2021). Istilah 'pelaporan terintegrasi' secara resmi diperkenalkan dalam kerangka King Code of Corporate Governance Principles (King III), sejalan dengan peningkatan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan di Afrika Selatan (De Villiers & Hsiao, 2017). Perbaikan ini dirancang untuk memajukan tujuan negara dalam meningkatkan investasi asing langsung dan secara bersamaan mengurangi korupsi, kesenjangan sosial, dan kesenjangan ekonomi di dalam negeri. King III mendesak para manajer untuk menyatukan data keuangan dan keberlanjutan dalam satu saluran komunikasi.

Kerangka kerja pelaporan terintegrasi, sebagaimana diuraikan oleh Pistoni et al. (2018), didukung oleh gagasan integrasi yang komprehensif, yang melibatkan kinerja perusahaan dipahami sebagai hasil dari pemanfaatan berbagai bentuk modal yang dikontribusikan oleh berbagai pemangku kepentingan: modal keuangan, manusia, teknologi, intelektual, sosial, dan lingkungan. Kerangka kerja ini mengharuskan secara eksplisit menguraikan hubungan antara strategi perusahaan dan kinerjanya. Integrasi ini selanjutnya diupayakan melalui proses dan protokol organisasi. Kerangka kerja ini mendorong perspektif holistik dan kerja sama yang kuat di antara berbagai fungsi untuk meningkatkan penciptaan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Nilai yang dihasilkan tidak hanya berasal dari operasi internal perusahaan, tetapi juga dari kekuatan hubungannya dengan berbagai pemangku kepentingan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *scoping review* dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur yang membahas tentang konsep laporan keberlanjutan, standar yang digunakan untuk melaporkan upaya keberlanjutan, dan perkembangan laporan berkelanjutan terintegrasi dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan 2023. Berdasarkan literatur yang telah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis konten untuk memetakan berbagai hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya pada topik yang dipilih sehingga dapat menjelaskan intisari atas berbagai penelitian tersebut. Hasil dari analisis konten yang telah dilakukan tersebut dijadikan dasar informasi untuk menyusun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal mula pelaporan keberlanjutan dapat ditelusuri kembali ke tahun 1962. Selama periode awal ini, kekhawatiran mengenai risiko lingkungan hidup muncul, dan kesadaran yang



berkembang mengenai masalah sosial dan lingkungan mulai terbentuk. Era ini menandai dimulainya diskusi mengenai keterkaitan antara kemajuan ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, tahun-tahun yang tercakup dalam fase dasar ini dapat dianggap sebagai tahap awal yang membuka jalan bagi pengembangan pelaporan keberlanjutan (Gokten et al., 2020). Pada tahun 1983, World Commission on Environment and Development (WCED) atau yang lebih dikenal dengan Komisi Brundtland memperkenalkan sudut pandang alternatif mengenai pembangunan berkelanjutan. Menurut Komisi tersebut, lingkungan dan ekonomi tidak boleh dianggap sebagai entitas yang berbeda. Ketika kita memandang lingkungan sebagai habitat kita dan pembangunan sebagai upaya kolektif kita untuk meningkatkan masyarakat kita, aspek-aspek ini secara inheren saling terkait. Secara ringkas, Komisi Brundtland menekankan bahwa lingkungan hidup lebih dari sekadar fisik. Dari perspektif ini, pembangunan global harus didekati secara universal sebagai sarana untuk memperbaiki dunia, daripada membagi negara ke dalam kategori kemakmuran atau kemiskinan. Oleh karena itu, masalah lingkungan dan kemajuan pembangunan merupakan hal yang mendasar bagi seluruh umat manusia.

Pada awal tahun 1990-an, konsep pelaporan keberlanjutan dibahas dalam kerangka kerja akuntansi dan pelaporan lingkungan, yang terutama difokuskan pada penilaian dampak lingkungan dari operasi bisnis. Pendekatan yang dikenal sebagai TBL (*Triple Bottom Line*), yang diperkenalkan pada tahun 1998, memperluas karakterisasi bisnis di luar dimensi ekonominya untuk mencakup aspek sosial dan lingkungannya. Pada tahun 1998, komite pengarah GRI menekankan perlunya kerangka kerja pelaporan yang tidak hanya mencakup dampak ekonomi, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, tahun 1998 menjadi tahun yang sangat penting dalam pergeseran dari akuntansi lingkungan ke akuntansi keberlanjutan.

Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengakui pedoman GRI sebagai kerangka kerja dasar untuk melakukan pelaporan keberlanjutan. Selanjutnya, pada tahun 2013, puncak dari proses pengembangan kerangka kerja tersebut menghasilkan G4, yang kemudian dirilis. Hal ini menandai transisi menuju fase akhir dari perjalanan standarisasi. Oleh karena itu, pada tahun 2014, GRI melanjutkan ke tahap akhir dari proses standarisasi dengan meluncurkan indeks konten dan membentuk Dewan Standar Keberlanjutan Global. Pada tahun berikutnya, 2015, GRI memperkenalkan ujian sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelaporan keberlanjutan menjadi sebuah domain yang menuntut kompetensi profesional khusus. Tahun 2016 menjadi saksi terbitnya set standar pelaporan keberlanjutan perdana oleh GRI.

Penerapan pelaporan keberlanjutan di Indonesia sendiri telah mengalami kemajuan yang signifikan, didorong oleh kesadaran yang semakin meningkat terkait konsekuensi ekologis, kepedulian sosial, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Menanggapi berbagai tantangan dan desakan dari para pemangku kepentingan di seluruh dunia, Indonesia telah mengambil langkah-langkah nyata untuk mendukung dan mengatur ranah pelaporan keberlanjutan. Untuk mengatur perumusan dan pelaksanaan pelaporan keberlanjutan atau strategi pelaporan perusahaan yang menyeluruh di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang berafiliasi dengan Federasi Akuntan Internasional (IFAC), membentuk *Comprehensive Reporting Task Force* (TF CCR). Entitas ini dibentuk untuk mempercepat adopsi standar pelaporan keberlanjutan yang selaras dan berkualitas tinggi secara global. Di Indonesia, sebanyak 144 emiten telah menerapkan prinsip-prinsip ESG dan memulai pelaporan keberlanjutan. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjadi contoh yang menonjol, setelah pada tahun 2019 menjadi perusahaan terkemuka yang telah menyusun laporan keberlanjutan secara cermat sesuai dengan prinsip-prinsip ESG. Istilah "laporan keberlanjutan" telah ada di Indonesia sejak tahun 2005, dan pertama kali diperkenalkan oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR). Meskipun demikian, NCSR lebih menekankan laporan



keberlanjutan yang mengikuti standar GRI. Khususnya, kewajiban untuk Laporan Keberlanjutan di Indonesia baru mengakar pada tahun 2017, sesuai dengan POJK No.51/POJK.03/2017, di mana cetak biru tersebut mengikuti tolok ukur internasional untuk pelaporan keberlanjutan.

Tonggak penting dalam lintasan implementasi pelaporan keberlanjutan dicontohkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Mandat khusus ini menetapkan bahwa entitas keuangan, emiten, dan perusahaan yang terdaftar di pasar harus menggabungkan praktik keuangan berkelanjutan dan menyusun Laporan Keberlanjutan yang komprehensif. Hal ini menunjukkan komitmen tegas yang ditunjukkan oleh badan-badan pengatur, yang menandakan dorongan untuk menciptakan transparansi dan budaya akuntabilitas dalam menghadapi kesulitan ekologi dan masyarakat.

Selanjutnya, pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) juga telah menjadi panduan utama bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keberlanjutan. GRI membantu perusahaan mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam strategi bisnis mereka, sekaligus memberikan kerangka kerja yang dapat diakui secara global. Hasilnya, banyak perusahaan di berbagai sektor, terutama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), telah mengambil langkah proaktif untuk mengadopsi praktik pelaporan keberlanjutan. Namun, tantangan masih ada dalam menghadapi penerapan ini secara lebih luas. Memahami metrik yang relevan untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan serta mengumpulkan data yang akurat tetap menjadi tantangan bagi banyak perusahaan. Peningkatan kapasitas dan kesadaran akan pentingnya laporan keberlanjutan juga diperlukan agar praktik ini lebih merata dan berkelanjutan di seluruh sektor industri di Indonesia. Dalam konteks ini, penerapan laporan keberlanjutan di Indonesia berada pada tahap yang dinamis, dengan potensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di negara ini.

Pelaporan terintegrasi (*Integrated Reporting/IR*) secara alamiah berkembang dari konsep pelaporan yang terhubung dan akuntansi keberlanjutan. Konsep-konsep ini bertujuan untuk membangun model pengambilan keputusan yang secara efektif memasukkan masalah keberlanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan (Kluth, 2013). Landasan pelaporan terintegrasi dapat ditelusuri kembali ke tujuan mendasar dari pelaporan yang terhubung: untuk melayani kepentingan investor jangka panjang dan manajemen eksekutif. Informasi yang dilaporkan harus secara jelas menggambarkan dan menjelaskan interaksi antara tujuan strategis organisasi, industri, pasar, dan konteks sosial yang berlaku, risiko dan peluang terkait yang dihadapi bisnis, sumber daya dan hubungan penting yang diandalkan, dan struktur tata kelola, penghargaan, dan remunerasi yang telah ditetapkan. Selain itu, strategi ini harus menetapkan hubungan yang koheren antara pelaksanaan strategi bisnis dan kinerja keuangan dan non-keuangan yang komprehensif.

Pelaporan terintegrasi berbeda dengan laporan keuangan dan laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam berbagai aspek. Tidak seperti laporan CSR yang berdiri sendiri, IR tidak hanya menggabungkan data keuangan tetapi juga dimensi ekonomi, tata kelola, dan sosial perusahaan. IR memberikan penekanan pada berbagai pemangku kepentingan dan menawarkan wawasan yang lebih luas tentang prospek masa depan perusahaan, dengan menggunakan diskusi strategis yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Lebih dari sekadar arus masuk dan arus keluar aset keuangan, IR mencakup spektrum sumber daya yang lebih luas. Ini mencakup barang-barang manufaktur yang penting untuk memproduksi barang atau memberikan layanan (seperti infrastruktur), *human capital* (terdiri dari keterampilan dan pengalaman karyawan), *intellectual capital* (mencakup aset tidak berwujud yang memberikan keunggulan kompetitif), *natural capital* (mencakup sumber daya seperti air, tanah, dan



ekosistem), serta *social capital* (mencakup hubungan utama, loyalitas pelanggan, pemasok, dan mitra) (Rupley et al., 2017).

Pelaporan terintegrasi merupakan respons penting terhadap lanskap bisnis yang terus berkembang dan meningkatnya kesadaran akan keterkaitan antara aspek keuangan, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pelaporan keuangan tradisional, meskipun penting, sering kali tidak mampu menangkap cakupan penuh operasi perusahaan dan dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan. Keterbatasan ini menjadi semakin nyata ketika isu-isu lingkungan dan sosial menjadi semakin penting, yang mengarah pada permintaan akan pendekatan pelaporan yang lebih holistik.

Salah satu alasan utama diperlukannya pelaporan terintegrasi adalah untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan koheren mengenai kinerja perusahaan. Dengan mengintegrasikan informasi keuangan dengan metrik non-keuangan, seperti kelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan praktik tata kelola perusahaan, pelaporan terintegrasi menawarkan pemahaman yang lebih lengkap kepada para pemangku kepentingan tentang operasi, risiko, dan peluang perusahaan. Perspektif holistik ini sangat penting bagi para pengambil keputusan, mulai dari investor dan regulator hingga konsumen dan karyawan, yang semakin mencari evaluasi yang bernuansa terhadap kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dan keselarasannya dengan tujuan masyarakat dan lingkungan yang lebih luas.

Selain itu, pelaporan terintegrasi juga menjawab tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat dalam praktik bisnis. Ketika isu-isu lingkungan dan sosial menjadi pusat dari agenda perusahaan, para pemangku kepentingan menyerukan pengungkapan yang lebih besar tentang bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap planet dan masyarakat. Pelaporan terintegrasi tidak hanya mendorong keterbukaan tentang kinerja perusahaan di bidang-bidang ini, tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan, perilaku etis, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan para pemangku kepentingan dan menunjukkan komitmen untuk mengatasi tantangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi dan ketahanan perusahaan secara keseluruhan.

Saat ini, standar pelaporan keberlanjutan menunjukkan keragaman yang mencolok. Hal ini mencakup lima kerangka kerja yang berbeda untuk pelaporan keberlanjutan, yang diakui sebagai Dewan pelaporan terintegrasi Internasional (*International Integrated Reporting Council/IIRC*), Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan (*Sustainability Accounting Standards Board/SASB*), Dewan Standar Pengungkapan Iklim (*Climate Disclosure Standards Board/CDSB*), Inisiatif Pelaporan Global (*Global Reporting Initiative/GRI*), dan Proyek Pengungkapan Karbon (*Carbon Disclosure Project/CDP*). Kelima standar ini secara kolektif telah mengakui pentingnya untuk secara kolaboratif membangun kerangka kerja yang komprehensif untuk pelaporan perusahaan.

Untuk mempercepat integrasi standar-standar baru ini, IIRC dan SASB telah menggabungkan upaya mereka, yang berpuncak pada pembentukan *Value Reporting Foundation* (VRF) (International Financial Reporting Standards, 2021). Pada bulan Januari 2022, CDSB menjadi bagian integral dari upaya IFRS Foundation, yang berkontribusi pada pengembangan Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (*International Sustainability Standards Board/ISSB*) (International Financial Reporting Standards, 2022). Selanjutnya, pada bulan Juni 2022, IFRS Foundation mengatur penyatuan CDSB dan VRF (International Financial Reporting Standards, 2022). GRI, SASB, CDP, dan CDSB telah berkolaborasi untuk merumuskan kerangka kerja dan standar yang kuat yang mengatur bidang pengungkapan keberlanjutan (CDP, 2023).

Implementasi pelaporan terintegrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan penting dalam beberapa tahun terakhir. Semakin kompleksnya lingkungan bisnis dan



meningkatnya perhatian terhadap isu-isu keberlanjutan telah mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mengadopsi praktik-praktik pelaporan terintegrasi. Langkah-langkah konkret telah dilakukan untuk mewujudkan hal ini, seperti pengembangan pedoman dan kerangka kerja oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan *Global Reporting Initiative* (GRI). Selain itu, dukungan dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memberikan dorongan untuk mendorong pelaporan terintegrasi.

Meskipun belum ada peraturan yang mewajibkan pelaporan terintegrasi di Indonesia, banyak perusahaan terutama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah berinisiatif untuk mengintegrasikan aspek keuangan dan non-keuangan dalam laporan tahunan mereka. Secara keseluruhan, perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) rata-rata telah memenuhi 50% dari elemen yang diperlukan. Kondisi ini menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa telah secara sukarela melaporkan informasi yang diperlukan, termasuk informasi keuangan dan sejumlah informasi non-keuangan mengenai aspek sosial dan lingkungan perusahaan. Menurut Kustiani (2016), jika otoritas pengawas pasar modal di Indonesia, yakni Otoritas Jasa Keuangan, akan mewajibkan implementasi Laporan Terintegrasi (IR), perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang signifikan dalam memenuhi persyaratan tersebut. Di tengah perkembangan standar pelaporan keberlanjutan secara global, Indonesia juga telah berpartisipasi dalam inisiatif internasional seperti Value Reporting Foundation (VRF) dan International Sustainability Standards Board (ISSB), yang menunjukkan komitmen untuk mendorong praktik-praktik pelaporan terintegrasi.

PENUTUP

Simpulan

Penerapan pelaporan keberlanjutan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, didorong oleh kesadaran yang semakin meningkat terkait konsekuensi ekologis, kepedulian sosial, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Laporan terintegrasi merupakan perkembangan dari laporan keberlanjutan. Tidak seperti laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, laporan terintegrasi tidak hanya menggabungkan data keuangan tetapi juga dimensi ekonomi, tata kelola, dan sosial perusahaan. Walaupun belum ada regulasi yang mengharuskan pelaporan terintegrasi di Indonesia, sejumlah perusahaan terutama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengambil langkah untuk menggabungkan dimensi keuangan dan non-keuangan dalam laporan tahunan mereka.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan di mana pembahasan atas topik pelaporan keberlanjutan, standar pelaporan keberlanjutan, serta pelaporan terintegrasi di Indonesia hanya dilihat secara umum berdasarkan literatur yang tersedia. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan dari tiap-tiap sektor karena setiap sektor memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis penerapan pelaporan keberlanjutan pada sektor tertentu di Indonesia. Analisis tersebut dapat memberikan gambaran spesifik mengenai perilaku pada tiap-tiap sektor yang dapat memberi gambaran terhadap upaya-upaya perusahaan dalam melakukan pelaporan keberlanjutan. Penelitian selanjutnya dapat mengelaborasi penerapan pelaporan keberlanjutan dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait berdasarkan beberapa ulasan-ulasan dalam literatur untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Ceulemans, K., Molderez, I., & van Iedekerke, L. (2015). Sustainability reporting in higher education: A comprehensive review of the recent literature and paths for further research. *Journal of Cleaner Production*, 106, 127-143. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.052>
- Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and sustainability reporting: economic analysis and literature review. *Review of Accounting Studies*, 26, 1176–1248. <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5>
- CDP. (2023). Five global organisations, whose frameworks, standards and platforms guide the majority of sustainability and integrated reporting, announce a shared vision of what is needed for progress towards comprehensive corporate reporting – and the intent to work together to achieve it. <https://www.cdp.net/en/articles/media/comprehensive-corporate-reporting>
- De Villiers, C., Venter, E. R., & Hsiao, P. C. K. (2017). Integrated reporting: background, measurement issues, approaches and an agenda for future research. *Accounting & Finance*, 57(4), 937-959.
- Global Reporting Initiative. (2022). *The gri standards: enabling transparency on organizational impacts*. GRI Standards.
- Global Reporting Initiative. (2016). *GRI 101: foundation*. <https://www.globalreporting.org/standards/media/1036/gri-101-foundation-2016.pdf>
- Gokten, S., Ozerhan, Y., & Gokten, P. O. (2020). The historical development of sustainability reporting: a periodic approach. *Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości*, 107(163), 99-118. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.2466>
- International Integrated Reporting Committee. (2021). *The international <ir> framework*. <https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf>
- International Financial Reporting Standards. (2021). *IIRC and SASB form the Value Reporting Foundation, providing comprehensive suite of tools to assess, manage and communicate value*. <https://integratedreporting.ifrs.org/news/iirc-and-sasb-form-the-value-reporting-foundation-providing-comprehensive-suite-of-tools-to-assess-manage-and-communicate-value/>
- International Financial Reporting Standards. (2022). IFRS Foundation completes consolidation of CDSB from CDP. <https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/01/ifrs-foundation-completes-consolidation-of-cdsb-from-cdp/>
- Kluth, A. (2013). *Integrated Reporting: Its Past, Present, and Future*. Emperor
- Kustiani, N. A. (2016). Penerapan elemen-elemen integrated reporting pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. *Info Artha*, 3, 44–61. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i0.38>
- Peraturan OJK. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik.aspx>
- Pistoni, A., Songini, L., & Bavagnoli, F. (2018). Integrated reporting quality: an empirical analysis. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(4), 489–507. <https://doi.org/10.1002/csr.1474>
- Rupley, K. H., Brown, D., & Marshall, S. (2017). Evolution of corporate reporting: from stand-alone corporate social responsibility reporting to integrated reporting. *Research in Accounting Regulation*, 29(2), 172–176. <https://doi.org/10.1016/j.racreg.2017.09.010>



Sustainability Accounting Standards Board. (2022). *Sasb standards overview*.
<https://sasb.org/standards/>
Sustain.Life (2023). *What are the GRI Standards?* <https://www.sustain.life/blog/gri-standards>